

# KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN KELOMPOK SADAR WISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI VATU MAPIDA

Mei Amanda <sup>1,\*</sup> Sasterio <sup>2</sup>; Sulfitri Husain <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia amandamey47@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia sasteriomansyur190961@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Tadulako, Palu, Indonesia sulfitrih@gmail.com

\*Correspondence : amandamey47@gmail.com

## ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Kolaborasi, Pemerintah Desa, Kelompok Sadar Wisata, Pengembangan Wisata, Wisata Pantai*

Received : Januari 2026

Revised : Februari 2026

Accepted : Maret 2026

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata dalam pengembangan wisata Pantai Vatu Mapida di Desa Enu, yang dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan potensi wisata pantai akibat keterbatasan fasilitas dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dilaksanakan di Desa Enu dalam kurun waktu penelitian tertentu, dengan melibatkan sejumlah informan yang terdiri dari aparatur pemerintah desa, anggota Kelompok Sadar Wisata, dan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori kolaborasi Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang menekankan tiga dimensi utama, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan cukup baik terutama pada aspek komunikasi dan pembagian peran, namun masih menghadapi kendala pada dimensi dampak dan adaptasi berupa keterbatasan fasilitas pendukung, minimnya anggaran, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi antar pihak dan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan kontribusi penting penelitian ini dalam mendukung pengembangan wisata Pantai Vatu Mapida yang lebih optimal dan berkelanjutan.

## ABSTRACT

*This study aims to explain the collaboration between the Village Government and the Tourism Awareness Group in the development of Vatu Mapida Beach tourism in Enu Village, which is motivated by the suboptimal management of coastal tourism potential due to limited facilities and community participation. This study uses a qualitative research design with a descriptive approach, conducted in Enu Village over a certain research period, involving a number of informants consisting of village government officials, members of the Tourism Awareness Group, and the local community. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis uses the collaboration theory of Emerson, Nabatchi, and Balogh (2012) which emphasizes three main dimensions, namely the dynamics of collaboration, collaborative actions, and impact and adaptation. The results of the study indicate that collaboration has been running quite well, especially in the aspects of communication and role division, but still faces obstacles in the dimensions of impact and adaptation in the form of limited supporting facilities, minimal budget, and low awareness of some community members. This study concludes that strengthening coordination between parties and increasing community participation are important contributions of this research in supporting the development of Vatu Mapida Beach tourism that is more optimal and sustainable.*

## Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pelestarian sosial dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks pembangunan, pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas rekreasi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial yang strategis karena melibatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Maspuha, Ardiansyah and Darmawan, 2025).

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan menuntut adanya tata kelola kolaboratif yang mampu mengintegrasikan kepentingan berbagai aktor serta menyeimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan (Pratiwi, 2025). Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi destinasi wisata. Pendekatan ini bertujuan agar manfaat ekonomi dan sosial pariwisata dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat sekaligus mendorong pelestarian budaya dan sumber daya lokal (Riyanto and Nugraha, 2023).

Seiring dengan perkembangan tata kelola pemerintahan, konsep *collaborative governance* menjadi pendekatan yang semakin relevan dalam pembangunan pariwisata. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan tata kelola kolaboratif sebagai pengaturan pemerintahan di mana lembaga publik melibatkan aktor non-pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan kolektif berbasis konsensus. Pendekatan ini berkembang sebagai respons atas keterbatasan kapasitas administratif pemerintah dalam menghadapi kompleksitas pembangunan, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutan kebijakan (Yanes *et al.*, 2019). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik kolaborasi lintas aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik. Studi tentang kolaborasi pemerintah dalam penyediaan hunian tetap pasca bencana menegaskan bahwa koordinasi antar instansi serta partisipasi masyarakat berperan penting dalam menjaga keberlanjutan program kolaboratif dan optimalisasi sumber daya pembangunan (Wiranata, Hartawan and Yunus, 2025). Selain itu, kajian *collaborative governance* pada isu sosial menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan, yang memungkinkan terciptanya layanan publik yang responsif meskipun menghadapi berbagai tantangan implementasi (Aprilia, Asrifai and Ahdiah, 2025). Temuan tersebut memperkuat relevansi analisis kolaborasi antara pemerintah desa dan

kelompok masyarakat dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis komunitas.

Penelitian lain dalam konteks pengelolaan pariwisata daerah menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* antara pemerintah dan masyarakat belum selalu berjalan optimal. Studi mengenai pengelolaan objek wisata Paralayang Wayu di Kabupaten Sigi menemukan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan menghadapi kendala berupa terbatasnya komunikasi, rendahnya tingkat kepercayaan, serta lemahnya komitmen dalam proses kolaborasi, meskipun upaya dialog tatap muka dan pembangunan pemahaman bersama telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan antar aktor (Mashita, Mahfuzat and Abdi, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat bergantung pada kualitas interaksi antar pihak yang terlibat.

Dari perspektif penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam kemitraan lokal, studi lain mengungkap bahwa kurang optimalnya perencanaan, pelatihan, dan evaluasi kinerja dalam program kolaborasi desa dapat menurunkan partisipasi masyarakat serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan bersama. Oleh karena itu, monitoring dan pendampingan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kemitraan strategis mampu meningkatkan kapasitas masyarakat serta mendukung keberhasilan program pembangunan desa (Pratama, Alamsyah and Bahri, 2024).

Selain itu, kajian empiris mengenai pengelolaan pariwisata berbasis kolaborasi menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah lokal, masyarakat, serta aktor pendukung lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola destinasi dan keberlanjutan ekonomi lokal. Kolaborasi yang terbangun melalui koordinasi lintas aktor mampu memperkuat kapasitas pengelolaan kawasan wisata sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas pariwisata. Temuan ini mempertegas bahwa pendekatan kolaboratif menjadi instrumen penting dalam pembangunan pariwisata berbasis komunitas serta relevan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini (Ragentu, Darwis and Pradana, 2025).

Jika ditinjau secara keseluruhan, berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa *collaborative governance* telah banyak dikaji dalam konteks pelayanan publik, pengelolaan sosial, maupun kemitraan pembangunan lokal, namun kajian yang secara spesifik menelaah dinamika kolaborasi antara pemerintah desa dan Kelompok Sadar Wisata dalam pengembangan destinasi wisata pantai berbasis masyarakat masih terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antar aktor secara umum, sementara interaksi kolaboratif dalam pengelolaan wisata desa dengan karakteristik lokal dan kondisi pascabencana belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis dinamika kolaborasi, tindakan bersama, serta dampak dan adaptasi dalam pengelolaan wisata Pantai Vatu Mapida melalui perspektif *collaborative governance*.

Karakteristik lokal suatu destinasi yang meliputi sumber daya alam, budaya, tradisi, dan kearifan lokal merupakan komponen utama daya tarik wisata sekaligus

pembentuk identitas lokal. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata perlu berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal dengan melibatkan masyarakat sebagai pemilik dan penjaga sumber daya wisata (Zabukovec Baruca and Čivre, 2022). Dalam konteks ini, Kabupaten Donggala memiliki potensi wisata bahari yang signifikan, salah satunya Pantai Vatu Mapida di Desa Enu yang berkembang melalui kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata.

Pengelolaan wisata Pantai Vatu Mapida mengalami dinamika sejak mulai berkembang pada tahun 2013. Pada periode 2014–2016, pengelolaan kawasan wisata dilakukan oleh Pemerintah Desa Enu dengan dukungan pendanaan operasional dari anggaran desa. Namun, sejak awal tahun 2017, pengelolaan wisata diserahkan kepada masyarakat lokal melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata Karang Alam yang beranggotakan pemuda setempat. Kelompok ini bertujuan menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan serta mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan. Meskipun demikian, dalam praktiknya keterlibatan anggota Kelompok Sadar Wisata masih terbatas karena sebagian besar anggota memiliki pekerjaan utama di luar pengelolaan wisata.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan wisata Pantai Vatu Mapida tidak sepenuhnya terlepas dari peran pemerintah. Pemerintah Desa Enu tetap memberikan dukungan kebijakan, fasilitasi, dan pendampingan, sementara Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala berperan dalam memberikan bimbingan teknis, khususnya terkait penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata, peningkatan kenyamanan pengunjung, serta penataan kawasan wisata. Pola hubungan ini menunjukkan adanya praktik tata kelola kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis desa.

Data Kelompok Sadar Wisata Karang Alam menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2016 mencapai sekitar 10.500 orang per tahun. Pada tahun 2017, jumlah kunjungan menurun menjadi sekitar 8.000 orang akibat bencana gempa dan tsunami. Namun, sejak tahun 2021 hingga saat ini, jumlah kunjungan kembali meningkat menjadi sekitar 9.360 orang per tahun. Meskipun demikian, peningkatan jumlah kunjungan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan wisata.

Permasalahan utama dalam pengembangan wisata Pantai Vatu Mapida terletak pada belum optimalnya kolaborasi antara Pemerintah Desa Enu dan Kelompok Sadar Wisata. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan partisipasi aktif anggota Kelompok Sadar Wisata, kurangnya dukungan anggaran dan fasilitas, serta belum terbangunnya ruang komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara pihak-pihak yang terlibat. Kondisi ini menyebabkan tindakan bersama dalam pengelolaan dan pengembangan wisata belum berjalan secara maksimal, sehingga berdampak pada belum optimalnya keberlanjutan pengelolaan wisata Pantai Vatu Mapida.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata. (Rasyid and Darumurti, 2022) menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus Mandalika diukur melalui indikator komunikasi dan dialog, pembangunan kepercayaan dan kesepahaman, legitimasi, serta komitmen. Meskipun kerja sama dinilai cukup efektif, penelitian tersebut menemukan masih adanya kelemahan dalam aspek dialog dan komunikasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dengan masyarakat lokal. Selain itu, (Lestari, Yulyana and Aryani, 2022) mengungkapkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata alam Green Canyon belum berjalan optimal akibat lemahnya desain kelembagaan, ketidakjelasan partisipasi pemangku kepentingan, serta minimnya pemahaman aktor terkait proses kolaborasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan aktor, tetapi juga oleh dinamika interaksi, tindakan bersama, dan kemampuan adaptasi dalam proses kolaborasi. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka *collaborative governance* yang dikemukakan oleh (Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012) yang menekankan tiga komponen utama, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan bersama, serta dampak dan adaptasi, sebagai alat analisis untuk memahami proses kolaborasi dalam pengelolaan wisata Pantai Vatu Mapida.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dinamika kolaborasi antara Pemerintah Desa Enu dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan wisata Pantai Vatu Mapida. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya kolaborasi, khususnya yang berkaitan dengan dinamika kolaborasi, tindakan bersama, serta dampak dan adaptasi dalam pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tata kelola kolaboratif pariwisata pada level desa, khususnya dalam konteks destinasi wisata pantai berbasis masyarakat di wilayah pasca bencana, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata, dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya memperkuat kolaborasi dan mewujudkan pengelolaan wisata Pantai Vatu Mapida yang berkelanjutan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bentuk dan proses kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan objek wisata Pantai Vatu Mapida di Desa Enu. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena kolaborasi secara komprehensif berdasarkan pengalaman, pandangan, serta interaksi para aktor yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata desa.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pantai Vatu Mapida, Desa Enu, dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan objek wisata yang sedang dikembangkan melalui kerja sama antara pemerintah desa dan Pokdarwis. Selain itu, lokasi ini dinilai relevan untuk mengkaji praktik kolaboratif dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan untuk menggali informasi terkait peran masing-masing aktor, proses pengambilan keputusan, bentuk kerja sama, serta kendala yang dihadapi dalam pengembangan Pantai Vatu Mapida. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi objek wisata, aktivitas pengelolaan, serta interaksi antara Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan masyarakat sekitar.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pengembangan pariwisata. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Enu, perangkat desa yang membidangi pariwisata, pengurus Pokdarwis, serta masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Pantai Vatu Mapida.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, berupa dokumen perencanaan desa, laporan kegiatan Pokdarwis, peraturan terkait kepariwisataan, serta data pendukung lain yang relevan dengan pengembangan Pantai Vatu Mapida.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian selesai. Proses analisis meliputi reduksi data, yaitu pemilahan dan penyederhanaan data sesuai fokus penelitian penyajian data, dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi yang sistematis serta penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian mengenai dinamika kolaborasi, tindakan kolaboratif, serta dampak dan adaptasi dalam pengembangan Pantai Vatu Mapida, dengan mengacu pada teori kolaboratif Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012).

## Hasil

### 1. Dinamika Kolaborasi

#### A. Prinsip Bersama (*Principled Engagement*)

Prinsip bersama merupakan fondasi awal dan berkelanjutan dalam proses kolaborasi. Prinsip ini dibangun melalui interaksi yang berlangsung secara terus-menerus, baik melalui dialog tatap muka maupun komunikasi yang dimediasi oleh teknologi. Dalam konteks pengembangan Pantai Vatu Mapida, prinsip bersama diwujudkan melalui kegiatan rapat dan evaluasi rutin yang dilakukan setiap bulan oleh para pemangku kepentingan untuk membahas kendala, kebutuhan, serta inovasi pengelolaan wisata.

Kolaborasi ini melibatkan berbagai aktor, antara lain Pemerintah Desa Enu, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Dinas Pariwisata, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pengunjung. Keberagaman aktor tersebut mencerminkan adanya proses pengungkapan kepentingan (*discovery*) sebagaimana dijelaskan oleh Emerson et al. (2012), yaitu proses di mana masing-masing aktor mengemukakan nilai, kepentingan, serta perannya dalam kolaborasi guna membangun pemahaman bersama (*shared*

*meaning*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Enu menyadari keterbatasan modal dan sumber daya manusia dalam mengelola Pantai Vatu Mapida secara mandiri. Oleh karena itu, Pemerintah Desa memilih untuk melibatkan masyarakat melalui Pokdarwis sebagai strategi pembagian peran dan tanggung jawab. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Enu "*Pantai Vatu Mapida dikelola oleh Pemerintah Desa melalui kerja sama dengan masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) karena adanya keterbatasan modal serta jumlah tenaga kerja jika dikelola sepenuhnya secara mandiri*" (Hasil wawancara, 25 Agustus 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengungkapan kepentingan yang jelas antara aktor pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Desa berfokus pada fungsi administratif, kebijakan, dan koordinasi lintas sektor, sementara Pokdarwis dan masyarakat menjalankan peran operasional di lapangan. Pengungkapan ini berkontribusi pada terbentuknya pembagian peran yang disepakati bersama, meskipun belum sepenuhnya diformalkan secara kelembagaan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota Pokdarwis yang menegaskan adanya kesadaran kolektif dalam berbagi tanggung jawab "*Kami berbagi tugas Desa yang urus izin dan hubungan ke Dinas Pariwisata, sementara kami yang pastikan kondisi di Pantai Vatu Mapida tetap berjalan baik setiap harinya.*" (Hasil wawancara, 25 Agustus 2025)" Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip bersama dalam kolaborasi tidak dibangun melalui paksaan struktural, melainkan melalui kesadaran akan kepentingan bersama. Keterlibatan masyarakat didorong oleh pemahaman bahwa pengelolaan wisata yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi lokal.

Praktik kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama mencerminkan konsep *collaborative problem solving*, di mana permasalahan kompleks membutuhkan kontribusi individu dengan keahlian dan perspektif berbeda agar dapat diselesaikan secara efektif (Graesser *et al.*, 2020). Kolaborasi di Pantai Vatu Mapida tidak hanya menghasilkan pembagian peran, tetapi juga menumbuhkan sikap saling memahami dan visi bersama di tengah keterbatasan sumber daya.

Selain itu, pembentukan Pokdarwis Kelompok Wisata Karang Alam yang melibatkan 20 pemuda lokal menjadi bukti konkret dari upaya penguatan prinsip bersama. Kelompok ini berfokus pada peningkatan keamanan, kenyamanan, serta pengelolaan retribusi parkir sebagai sumber pendapatan operasional. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan, yang mencapai lebih dari 100 orang per hari, menunjukkan bahwa kolaborasi ini memberikan dampak nyata.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan kendala pada tingkat implementasi, khususnya terkait konsistensi partisipasi sumber daya manusia. Tidak semua anggota Pokdarwis dapat terlibat aktif secara berkelanjutan karena memiliki pekerjaan utama lain. Kondisi ini menyebabkan hanya sebagian kecil anggota yang menjalankan fungsi manajerial dan operasional secara intensif, sehingga berpotensi melemahkan keberlanjutan prinsip bersama yang telah terbentuk.

Dari sisi pemerintah daerah, Dinas Pariwisata menjalankan peran pembinaan dan pendampingan sebagai bentuk dukungan non-fisik akibat keterbatasan anggaran. Strategi ini mencerminkan fungsi pemerintah dalam aspek alokasi, distribusi, dan stabilisasi, khususnya melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat dapat mandiri dalam mengelola potensi wisata.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi dalam pengembangan Pantai Vatu Mapida telah memenuhi unsur prinsip bersama sebagaimana dikemukakan oleh (Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012). Kolaborasi dibangun atas dasar kepentingan ekonomi, tanggung jawab moral, dan kesadaran kolektif. Namun, keberlanjutan kolaborasi masih menghadapi tantangan kelembagaan, terutama terkait konsistensi peran dan komitmen anggota Pokdarwis, yang perlu mendapat perhatian agar kolaborasi dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

## **B. Motivasi Bersama**

Motivasi bersama dalam pengembangan pariwisata Pantai Vatu Mapida di Desa Enu menjadi pendorong utama bagi semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama, meskipun implementasinya menghadapi berbagai kendala. Salah satu aspek penting adalah kepercayaan bersama, di mana semua aktor, termasuk Pemerintah Desa, Pokdarwis, dan masyarakat, menyadari bahwa kerja sama hanya akan efektif jika dibangun atas dasar saling percaya. Hasil wawancara dengan Ibu Ram'ani menunjukkan bahwa kepercayaan ini diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan komunikasi rutin, sehingga Pokdarwis dapat mengikuti seluruh perkembangan pengelolaan pantai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Kepercayaan menjadi kunci sinergi karena tanpa rasa saling percaya, proses kolaborasi tidak akan berjalan lancar. Pemerintah Desa berupaya menjaga kepercayaan tersebut melalui transparansi, pembagian informasi secara terjadwal, dan koordinasi intensif dengan anggota Pokdarwis yang aktif, yang sekaligus mencerminkan fungsi stabilisasi, alokasi non-fisik, dan distribusi pengetahuan dalam teori fungsi pemerintah. Kepala Desa Enu menegaskan bahwa setiap kegiatan selalu dikonfirmasi dan didiskusikan dengan anggota Pokdarwis yang masih aktif, meskipun jumlahnya terbatas, untuk memastikan keberlangsungan pengelolaan pantai. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun keterbatasan anggota Pokdarwis dan sumber daya menjadi tantangan, upaya membangun kepercayaan tetap menjadi landasan utama agar kolaborasi dapat berjalan.

Selain kepercayaan, pemahaman bersama antaraktor juga menjadi faktor penting dalam motivasi kolaborasi. Pemahaman bersama tercipta melalui komunikasi yang konsisten, evaluasi kegiatan, dan saling menghargai tugas masing-masing pihak. Hasil wawancara dengan Ibu Nuraisyah dari Dinas Pariwisata dan Bapak Muhdin dari Pokdarwis menunjukkan bahwa intensitas komunikasi dan evaluasi saat ini menurun karena banyak anggota Pokdarwis yang tidak lagi aktif. Kondisi ini menyebabkan interaksi lebih terbatas pada segelintir anggota yang tetap konsisten,

sehingga kolaborasi berjalan secara parsial dan tidak optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman bersama akibat disfungsi internal organisasi mitra memaksa Pemerintah Desa melakukan adaptasi pragmatis dalam menjalankan peran koordinasi, yang berdampak pada terbatasnya representasi kelembagaan dan kurang optimalnya sinergi. Dengan kata lain, keberhasilan kolaborasi sangat tergantung pada kesiapan dan konsistensi kedua belah pihak, di mana struktur internal Pokdarwis menjadi faktor penentu dalam efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan.

Aspek ketiga dari motivasi bersama adalah komitmen, yang mengatur sejauh mana pihak-pihak yang terlibat menjaga kesepakatan dan melaksanakan tanggung jawabnya secara konsisten. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Enu dan anggota Pokdarwis, Bapak Muhdin, menunjukkan bahwa komitmen secara formal telah ditetapkan melalui aturan dan kesepakatan, namun realitas di lapangan berbeda karena sebagian anggota Pokdarwis kurang aktif. Hal ini menyebabkan kolaborasi kehilangan efektivitasnya meskipun aturan formal telah tersedia. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rasyid and Darumurti, 2022) yang menekankan bahwa keberadaan regulasi formal dan komitmen tertulis saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan kolaborasi sinkronisasi antara komitmen pemerintah dan keaktifan mitra di lapangan menjadi faktor kunci. Kondisi ini menegaskan bahwa optimalisasi tata kelola Pantai Vatu Mapida sangat bergantung pada konsistensi partisipasi sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan. Tanpa komitmen yang nyata dan berkelanjutan, kesepakatan yang ada hanya menjadi instrumen formal tanpa dampak signifikan terhadap pengembangan destinasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi bersama di Pantai Vatu Mapida terbentuk melalui kepercayaan, pemahaman, dan komitmen antaraktor, namun implementasinya menghadapi kendala signifikan akibat rendahnya partisipasi anggota Pokdarwis. Meskipun pemerintah berupaya mengelola komunikasi, evaluasi, dan pendampingan secara intensif, lemahnya partisipasi kolektif membatasi efektivitas kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi bersama, walaupun menjadi pendorong penting dalam kolaborasi, belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan konsistensi partisipasi aktor, sehingga pengelolaan Pantai Vatu Mapida masih membutuhkan penguatan kapasitas internal dan komitmen berkelanjutan agar tujuan bersama dapat tercapai.

### **C. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama**

Kapasitas melakukan tindakan bersama dalam pengembangan pariwisata Pantai Vatu Mapida mencerminkan sejauh mana pihak-pihak yang terlibat memiliki kemampuan, pengetahuan, dan sumber daya untuk berkolaborasi secara efektif. Salah satu aspek penting adalah kepemimpinan, yang berperan sebagai pengarah, mediator, fasilitator, dan advokat bagi masyarakat serta Pokdarwis. Hasil wawancara dengan Ibu Nuraisyah dari Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa meskipun instansi pemerintah memiliki otoritas untuk memberikan arahan dan menentukan parameter

pengembangan, efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada dukungan kolektif dari masyarakat dan Pokdarwis. Kendala utama yang muncul adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat, yang menghambat realisasi arahan dan kebijakan pemerintah di lapangan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Muhdin dari Pokdarwis, yang menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk menciptakan kesadaran wisata dan menjalankan kegiatan operasional belum berjalan optimal karena komunikasi dengan Pemerintah Desa tidak lagi terjalin dengan baik. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat harus didukung oleh partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan pariwisata dapat berjalan sesuai tujuan bersama.

Aspek kedua adalah pengetahuan, yang menjadi modal penting bagi aktor untuk berpartisipasi dalam kolaborasi. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Dinas Pariwisata secara rutin memberikan pelatihan, arahan, dan informasi terkait pengembangan pantai, namun saat ini distribusi pengetahuan lebih difokuskan pada anggota Pokdarwis yang masih aktif. Pendekatan selektif ini merupakan strategi adaptif untuk memastikan setiap arahan diterapkan secara efektif, namun berdampak pada terjadinya kesenjangan kompetensi dan asimetri informasi antara anggota yang aktif dan yang pasif. Bapak Aslan menegaskan bahwa informasi dan arahan hanya diberikan kepada mereka yang tetap konsisten menjalankan tugas operasional, sehingga kolaborasi saat ini bersifat parsial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan merupakan instrumen strategis untuk membangun kapasitas lokal, efektivitasnya tergantung pada keterlibatan dan konsistensi anggota.

Aspek ketiga adalah sumber daya, yang mencakup kapasitas fisik maupun nonfisik yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata telah menyediakan forum koordinasi dan pembagian peran, tetapi keterbatasan jumlah anggota Pokdarwis yang aktif menjadi hambatan utama. Minimnya partisipasi kolektif menyebabkan pembagian peran tidak terlaksana secara merata dan kegiatan operasional menjadi terbatas pada beberapa individu kunci saja. Hal ini diperkuat oleh Bapak Muhdin, yang menjelaskan bahwa keterlibatan mereka hanya sebatas membersihkan area pantai dan menjaga keamanan karena kurangnya koordinasi dan pertemuan resmi. Temuan ini menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya tidak hanya soal kapasitas fisik, tetapi juga terkait keberlanjutan partisipasi, komunikasi, dan pembagian peran secara kolektif, sehingga efektivitas kolaborasi saat ini masih terbatas dan belum optimal sesuai teori Balogh dkk.

Secara keseluruhan, kapasitas melakukan tindakan bersama di Pantai Vatu Mapida menunjukkan bahwa kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya menjadi faktor penentu keberhasilan kolaborasi. Meskipun pemerintah telah berupaya menyediakan arahan, pelatihan, dan forum koordinasi, keterbatasan partisipasi Pokdarwis dan masyarakat mengakibatkan pelaksanaan kolaborasi bersifat parsial. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata yang efektif membutuhkan sinergi antara kepemimpinan yang kuat, distribusi pengetahuan yang merata, dan pemanfaatan sumber daya secara kolektif agar tujuan

bersama dapat tercapai secara optimal.

## 2. Tindakan-tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi dalam pengembangan pariwisata Pantai Vatu Mapida dilakukan melalui serangkaian kegiatan nyata yang mencerminkan interaksi dan kerja sama antar pihak, termasuk Pemerintah Desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat, pelaku usaha, dan pengunjung. Setiap pihak memiliki peran spesifik yang saling melengkapi sehingga tercipta pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Namun, efektivitas kolaborasi ini masih terbatas akibat kendala komunikasi, frekuensi intervensi yang rendah, serta penurunan keaktifan anggota Pokdarwis.

Salah satu bentuk tindakan kolaborasi adalah fasilitasi (*facilitating*), yang dilakukan untuk mempermudah implementasi kerja sama melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan arahan kepada masyarakat maupun anggota Pokdarwis. Hasil wawancara dengan Ibu Nuraisyah dari Dinas Pariwisata mengungkapkan bahwa upaya fasilitasi sudah dilakukan melalui sosialisasi kesadaran wisata dan bimbingan teknis, namun frekuensinya sangat rendah sehingga berdampak pada penurunan aktivitas Pokdarwis. Pernyataan Ketua Pokdarwis, Bapak Muhdin, menegaskan bahwa meskipun mereka tetap memberikan kontribusi tenaga dan mengirim anggota untuk pelatihan, upaya ini belum maksimal karena keterbatasan dukungan dan frekuensi pelaksanaan dari pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa Beberapa studi empiris menemukan bahwa meskipun kerangka *collaborative governance* idealnya menuntut pendampingan yang konsisten, fasilitasi yang efektif, serta penyederhanaan tugas bersama antar pemangku kepentingan agar kolaborasi berjalan optimal, implementasi di lapangan sering belum mencapai kondisi tersebut karena hambatan koordinasi, kapasitas fasilitator yang belum memadai, dan kurangnya mekanisme kerja sama yang terstruktur (Yasintha, 2020).

Tindakan kedua adalah memajukan proses kolaborasi (*advancing the process*), yang dilakukan melalui pertemuan berkala, komunikasi, dan koordinasi antara pihak pemerintah, Pokdarwis, dan masyarakat. Namun, hasil wawancara mengindikasikan bahwa pertemuan dan komunikasi ini jarang dilakukan sehingga kolaborasi belum efektif. Hambatan komunikasi menyebabkan stagnasi koordinasi, di mana rencana pengembangan kawasan tidak tersosialisasikan dengan baik hingga ke tingkat akar rumput. Sebagai akibatnya, kerja sama cenderung bersifat formal dan administratif, bukan kolaboratif yang melibatkan partisipasi aktif semua pihak.

Selain itu, Pokdarwis berperan sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan pantai, termasuk menjaga kebersihan, mengatur parkir, membantu pengunjung, dan menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Pernyataan Bapak Muhdin menekankan bahwa semua kegiatan dilakukan secara gotong royong, namun dukungan pemerintah dan Dinas Pariwisata baru hadir pada kegiatan besar, sehingga kapasitas kolaborasi sering terhambat. Pemerintah Desa sendiri berperan sebagai fasilitator melalui penyediaan infrastruktur, regulasi, dan dukungan logistik. Pelaku usaha lokal juga turut berkontribusi, khususnya dalam

menjaga kebersihan dan kelestarian pantai karena keberhasilan pengelolaan berdampak langsung pada pendapatan mereka. Selain itu, pengunjung juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan menjaga kebersihan dan menghormati fasilitas.

Temuan ini menegaskan bahwa meskipun terdapat hambatan struktural, kolaborasi di Pantai Vatu Mapida tetap berlangsung melalui sinergi antara pemerintah, Pokdarwis, pelaku usaha, dan pengunjung. Kolaborasi yang terbentuk bersifat kombinasi antara formal dan informal, di mana aksi nyata sektor privat dan partisipasi masyarakat mendukung keberlanjutan destinasi meski ada keterbatasan kapasitas internal pengelola. Hal ini sejalan dengan konsep *capacity for joint action* menurut (Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012), yang menekankan kemampuan berbagai pihak untuk bekerja secara sinergis, saling mendukung, dan bertanggung jawab terhadap peran masing-masing.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kolaborasi di Pantai Vatu Mapida mencakup fasilitasi, pemajuan proses kolaborasi, pembagian peran, dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan. Meski berbagai bentuk tindakan sudah dilaksanakan, efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya frekuensi fasilitasi, minimnya komunikasi, dan penurunan partisipasi anggota Pokdarwis, sehingga kolaborasi yang terjadi belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan.

### 3. Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi

Kolaborasi yang terjadi di Pantai Vatu Mapida telah memberikan sejumlah dampak positif baik terhadap pengembangan wisata maupun masyarakat lokal. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan pantai. Kesadaran ini tercermin dalam kegiatan gotong royong rutin, pemantauan pengunjung, serta kepatuhan terhadap aturan desa.

Kolaborasi juga berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, karena pantai yang terjaga kebersihannya, fasilitas yang tertata, serta pelayanan yang ramah, membuat Pantai Vatu Mapida menjadi destinasi lebih menarik. Peningkatan kunjungan ini memberikan dampak ekonomi positif bagi pelaku usaha lokal, yang dapat menawarkan makanan, minuman, dan jasa wisata lainnya.

Selain itu, kolaborasi memungkinkan adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya. Masyarakat dan Pokdarwis menyesuaikan metode pengelolaan pantai berdasarkan masukan dari pengunjung maupun pemerintah desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Nuraisyah dari Dinas Pariwisata

*“Kami selalu berupaya memberikan pendampingan dan pemantauan pada destinasi wisata yang dikelola oleh masyarakat, termasuk Pantai Vatu Mapida. Memang, bantuan dana belum dapat kami berikan secara maksimal karena anggaran kami masih sangat terbatas. Namun, kami berharap masyarakat tetap bersemangat dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di sana.” (Hasil Wawancara, 27 Agustus 2025)*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi bukan hanya soal pembagian peran, tetapi juga tentang kemampuan adaptasi untuk menghadapi

keterbatasan sumber daya dan tantangan operasional. Efektivitas kolaborasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik, saling percaya, dan kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak dalam mencapai tujuan bersama.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Enu, Bapak Aslan, dijelaskan:

*“Mengelola pariwisata memang sulit jika dilakukan sendiri, karena banyak hal yang harus dikerjakan sementara sumber daya yang tersedia terbatas. Oleh karena itu, kami harus berkolaborasi dengan pihak lain, yaitu Pokdarwis Pantai Vatu Mapida dan masyarakat sekitar. Dampaknya, kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Namun demikian, kolaborasi yang kami jalankan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya komunikasi antara Pemerintah Desa dan Pokdarwis.”* (Hasil Wawancara, 28 Agustus 2025)

Hasil ini menunjukkan bahwa kolaborasi telah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan sadar wisata, tercermin dari kebiasaan menjaga kebersihan, keramahan terhadap wisatawan, dan keamanan pantai. Namun, dampak keseluruhan belum optimal, karena belum semua aspek pengelolaan kawasan terpenuhi, seperti keindahan, ketertiban, dan tata ruang fisik pantai yang masih dipengaruhi oleh aktivitas domestik dan bangunan semi-permanen masyarakat.

Pernyataan Bapak Muhdin dari Pokdarwis juga menegaskan hal ini:

*“Pengembangan pariwisata Pantai Vatu Mapida tidak dapat dilakukan secara mandiri, sehingga kami turut terlibat dan berkolaborasi dengan Pemerintah Desa. Namun, menurut kami, kolaborasi tersebut belum memberikan dampak yang besar (signifikan) terhadap perkembangan pariwisata di Pantai Enu. Terlebih lagi, kurangnya komunikasi dari pihak kami juga berdampak pada pengelolaan pantai tersebut.”* (Hasil Wawancara, 28 Oktober 2025)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kolaborasi terhadap pengembangan Pantai Vatu Mapida bersifat parsial. Kesadaran masyarakat terhadap sadar wisata dan peluang ekonomi lokal mulai terbentuk, tetapi keterbatasan komunikasi, sumber daya, dan koordinasi antara Pemerintah Desa dan Pokdarwis menghambat pencapaian hasil secara menyeluruh.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh (Masaguni *et al.*, 2025), yang menekankan bahwa beberapa studi tentang *collaborative governance* menunjukkan bahwa proses kolaborasi tidak bersifat linier, melainkan bersifat siklikal, di mana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan menghasilkan umpan balik yang kemudian dianalisis dan diadaptasi oleh seluruh pihak untuk memperbaiki strategi kolaboratif, meningkatkan koordinasi, dan menyesuaikan tindakan berikutnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Di Pantai Vatu Mapida, umpan balik ini tercermin dari penyesuaian pola pengelolaan pantai oleh Pokdarwis dan masyarakat lokal, serta adaptasi strategi pendampingan dari pihak Dinas Pariwisata.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi di Pantai Vatu Mapida telah memberikan dampak positif sosial dan ekonomi, sekaligus membentuk mekanisme adaptasi yang memungkinkan keberlangsungan pengelolaan destinasi meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Meski demikian, kolaborasi belum mencapai efektivitas maksimal karena beberapa tujuan pengelolaan kawasan, seperti estetika, ketertiban, dan koordinasi yang solid antara pemangku kepentingan, masih perlu ditingkatkan.

## Pembahasan

### 1. Dinamika Kolaborasi

#### A. Prinsip Bersama (*Principled Engagement*)

Prinsip bersama (*Principled Engagement*) menjadi fondasi penting dalam kolaborasi pengembangan pariwisata Pantai Vatu Mapida, karena menentukan arah, kualitas komunikasi, dan kesepahaman antar aktor yang terlibat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik *focus group discussions* dan pertemuan antar pemangku kepentingan sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif. Forum seperti ini digunakan untuk mendiskusikan peran masing-masing aktor, masalah yang dihadapi, serta strategi pengembangan pariwisata lokal (Afni, 2022). Aktivitas ini mencerminkan praktik pengungkapan (*disclosure*), yaitu keterbukaan terhadap kepentingan, nilai, dan harapan tiap aktor, sebagaimana diuraikan oleh (Utami, Adianto and Mayarni, 2022) bahwa implementasi *collaborative governance*, keterlibatan aktor dalam dialog tatap muka yang menghasilkan *common understanding* atau pemahaman bersama merupakan bagian dari proses kolaboratif yang efektif untuk pembangunan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Keterlibatan Pokdarwis dalam tugas operasional seperti menjaga kebersihan dan mengelola parkir, sementara Pemerintah Desa mengurus aspek administratif dan koordinasi dengan Dinas Pariwisata, menunjukkan pembagian peran yang efektif sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak. Hal ini selaras dengan teori (Berliandaldo, Chodiq and Fryantoni, 2021) bahwa Kolaborasi multi-aktor dalam pengembangan pariwisata melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama praktik ini menciptakan sinergi struktural yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang optimal yang tidak dapat dicapai oleh aktor individual secara berdiri sendiri.

Selanjutnya, prinsip deliberasi (diskusi bersama) menjadi mekanisme penting untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan. Diskusi ini sejalan dengan (Robertson and Choi, 2012) yang menekankan bahwa deliberasi merupakan *inti* dari kolaborasi multi-aktor karena melalui prosesnya para pemangku kepentingan dapat secara terbuka bertukar ide, mengidentifikasi masalah bersama, dan bergerak menuju pencapaian konsensus yang disepakati bersama, sehingga menjadi indikasi keberhasilan dan legitimasi tindakan kolaboratif. Namun, penelitian menemukan bahwa praktik deliberasi saat ini belum optimal karena Pemerintah Desa cenderung lebih fokus kepada anggota Pokdarwis yang aktif, sehingga sebagian anggota lainnya jarang dilibatkan. Kondisi ini mengurangi efektivitas prinsip bersama karena komunikasi dua arah dan partisipasi kolektif tidak berjalan merata.

Selain itu, motivasi ekonomi dan moral juga menjadi pendorong utama keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Pantai Vatu Mapida. Wawancara dengan pelaku usaha setempat mengungkapkan bahwa masyarakat secara sukarela membantu Pokdarwis karena menyadari keterkaitan langsung antara kebersihan pantai dan potensi pendapatan tambahan. Fenomena ini sejalan dengan penelitian

(Chan, Marzuki and Mohtar, 2021) yang menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata berbasis komunitas tidak hanya didorong oleh insentif ekonomi berupa peluang pendapatan dan manfaat kesejahteraan, tetapi juga oleh komitmen moral terkait pelestarian budaya, lingkungan, dan tanggung jawab sosial yang mereka rasakan sebagai bagian dari komunitas lokal. Pola ini menunjukkan bahwa penggerakan prinsip bersama tidak hanya formal, tetapi juga dipengaruhi oleh modal sosial, kesadaran kolektif, dan persepsi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Dari perspektif fungsi pemerintah, proses pengembangan pariwisata di Pantai Vatu Mapida juga mencerminkan penerapan Fungsi Stabilisasi, Alokasi, dan Distribusi. Stabilisasi pembangunan desa dapat tercermin melalui upaya menciptakan kemandirian masyarakat agar keberlanjutan sosial dan ekonomi tetap terjaga, sedangkan alokasi dan distribusi program terlihat melalui penyediaan koordinasi kelembagaan serta transfer kapasitas melalui pembinaan dan pelatihan kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kemandirian masyarakat merupakan indikator penting pemberdayaan dalam pengelolaan desa wisata, serta peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan peran Pokdarwis dalam pengembangan potensi lokal (Rahman and Natalia, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan teori (Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012) yang menekankan bahwa kolaborasi yang berhasil membutuhkan pengelolaan kapasitas bersama, pemahaman lintas aktor, dan distribusi sumber daya untuk memastikan keberlanjutan tujuan kolaboratif.

Secara keseluruhan, prinsip bersama di Pantai Vatu Mapida telah berjalan positif melalui pengungkapan kepentingan, pembagian peran yang jelas, deliberasi, dan keterlibatan masyarakat berbasis insentif ekonomi serta tanggung jawab moral. Namun, hambatan muncul akibat tidak meratanya partisipasi anggota Pokdarwis dan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga deliberasi dan pengambilan keputusan kolektif tidak optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kesiapan aktor, modal sosial, dan distribusi kapasitas antar pihak secara berkelanjutan.

## **B. Motivasi Bersama**

Motivasi bersama menjadi faktor krusial dalam membangun kolaborasi efektif di Pantai Vatu Mapida, karena seluruh pihak yang terlibat mulai dari Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), hingga masyarakat lokal harus memiliki tujuan yang sama dan diarahkan untuk mencapainya secara kolektif. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam motivasi bersama adalah kepercayaan antar pihak (*trust*). Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Enu menunjukkan bahwa informasi yang transparan dan komunikasi yang konsisten menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan ini. Kepercayaan bersama memfasilitasi koordinasi, mencegah konflik, dan memungkinkan tindakan kolaboratif berjalan lancar, meskipun jumlah anggota Pokdarwis yang aktif semakin terbatas.

Temuan ini sejalan dengan (Hanafi, 2022), yang menekankan bahwa dalam proses kolaborasi pengelolaan destinasi pariwisata, integritas dan kualitas kepercayaan antar pemangku kepentingan terbukti menjadi prasyarat penting untuk menjaga stabilitas kerja sama dan efektivitas pengelolaan, karena tanpa terciptanya hubungan kepercayaan yang kuat, komitmen bersama dan koordinasi tindakan sering kali melemah dan menghambat pencapaian tujuan pariwisata yang berkelanjutan.

Selain kepercayaan, pemahaman bersama menjadi pilar motivasi kolektif. Pemahaman bersama mengacu pada kesepakatan dan keselarasan persepsi antara aktor terkait mengenai peran, tanggung jawab, dan prosedur dalam pengelolaan destinasi. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pariwisata, komunikasi rutin, evaluasi kegiatan, serta penghargaan terhadap peran masing-masing pihak merupakan upaya untuk membangun pemahaman bersama. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya disfungsi kelembagaan akibat rendahnya partisipasi anggota Pokdarwis, sehingga frekuensi komunikasi dan koordinasi menurun. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya tergantung pada arahan formal pemerintah, tetapi juga pada kemampuan internal komunitas untuk mempertahankan struktur komunikasi dan koordinasi yang efektif, sebagaimana ditekankan dalam teori (Damanik and Rahayu, 2021) bahwa pemahaman bersama (*shared understanding*) yang dibangun melalui komunikasi, dialog, dan refleksi antar aktor kolaboratif merupakan prasyarat penting untuk kelancaran interaksi dalam proses kolaborasi, karena tanpa pemahaman yang sama mengenai tujuan, nilai, dan strategi kerja sama, konflik interpretasi dan miskomunikasi dapat menghambat efektivitas kolaboratif.

Komponen ketiga yang mendukung motivasi bersama adalah komitmen terhadap tujuan dan aturan yang telah disepakati. Hasil wawancara dengan Pemerintah Desa dan Pokdarwis menunjukkan bahwa komitmen formal berupa regulasi atau kesepakatan tertulis tidak otomatis menjamin keberlanjutan pengelolaan. Rendahnya partisipasi anggota Pokdarwis menjadi penghambat utama, sehingga aturan yang ada hanya berlaku secara simbolis. Hal ini mendukung temuan (Putro and Briliayanti, 2019) bahwa efektivitas kolaborasi pemangku kepentingan (termasuk pemerintah, komunitas, dan sektor swasta) dalam pengelolaan destinasi dipengaruhi oleh adanya tujuan bersama yang terkoordinasi dan komitmen tinggi dari semua pihak, meskipun tantangan seperti kepercayaan dan komunikasi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil optimal. Dalam konteks ini, komitmen bukan sekadar kepatuhan formal, tetapi juga keterlibatan aktif yang menegaskan keseriusan semua pihak dalam menjalankan tanggung jawab kolektif.

Secara keseluruhan, motivasi bersama di Pantai Vatu Mapida terbangun melalui integrasi antara kepercayaan, pemahaman, dan komitmen. Meski faktor-faktor ini telah menjadi fokus pemerintah dan komunitas, praktik di lapangan menunjukkan adanya keterbatasan akibat menurunnya jumlah anggota aktif Pokdarwis, komunikasi yang jarang, dan pengelolaan informasi yang tidak merata. Fenomena ini menegaskan bahwa motivasi bersama harus didukung oleh modal sosial yang kuat, partisipasi

kolektif yang konsisten, serta mekanisme komunikasi yang berkelanjutan. Pendekatan ini sesuai dengan teori Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) mengenai *capacity for joint action*, di mana keberhasilan kolaborasi bergantung pada integrasi kepercayaan, pemahaman, dan komitmen semua pihak. Temuan serupa juga diperkuat oleh penelitian (Syarifuddin, 2025), Dalam pariwisata berbasis masyarakat, modal sosial yang mencakup jaringan sosial, kepercayaan, norma bersama, serta keterlibatan aktif komunitas menjadi faktor penting yang memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dan memfasilitasi keberlanjutan kolaborasi, karena hubungan sosial yang kuat mendorong partisipasi, mobilisasi sumber daya lokal, dan aksi kolektif yang berkelanjutan.

### C. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Kapasitas melakukan tindakan bersama merupakan dimensi penting dalam kolaborasi pengembangan pariwisata, karena menentukan sejauh mana para aktor yang terlibat mampu bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya menjadi tiga komponen utama yang membentuk kapasitas ini. Kepemimpinan memainkan peran sentral dalam mengarahkan, memediasi, dan memfasilitasi kolaborasi antar-pihak. Dinas Pariwisata, sebagai instansi pemerintah, memiliki otoritas untuk memberikan arahan dan menentukan parameter pengembangan bagi Pokdarwis dan masyarakat lokal. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada dukungan kolektif masyarakat. Meskipun kebijakan dan arahan telah diberikan, minimnya partisipasi masyarakat serta komunikasi yang tidak terjalin secara efektif menjadi hambatan fundamental, sehingga memperlambat akselerasi pengembangan Pantai Vatu Mapida. Hal ini konsisten dengan teori (Nurhayati, Kusuma and Rahman, 2024) yang menyatakan bahwa Kepemimpinan dalam konteks kolaboratif tidak semata-mata merupakan fungsi instruksi formal melainkan sebuah proses sinergis dua arah yang menuntut pemimpin untuk memotivasi, mengintegrasikan dan mendorong keterlibatan aktif seluruh aktor, sambil menciptakan struktur komunikasi *shared-leadership* yang kuat sehingga kolaborasi berjalan efektif dalam mencapai tujuan bersama.

Selain kepemimpinan, pengetahuan menjadi faktor krusial dalam membangun kapasitas kolaboratif. Pengetahuan yang dimaksud adalah informasi dan arahan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk berpartisipasi secara efektif dalam kolaborasi. Berdasarkan wawancara, Dinas Pariwisata masih memberikan pelatihan dan informasi secara selektif hanya kepada anggota Pokdarwis yang aktif, sehingga kelompok yang kurang aktif tidak menerima arahan yang sama. Pola selektif ini, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pada pihak yang benar-benar mengelola destinasi, menyebabkan terjadinya fragmentasi kolaborasi dan kesenjangan kompetensi antara anggota yang aktif dan pasif. Fenomena ini sejalan dengan temuan (Ahmad *et al.*, 2024), yang menekankan bahwa strategi pengembangan SDM sektor pariwisata melalui partisipasi masyarakat memberikan peluang

pertukaran pengetahuan antara pelaku dan komunitas lokal, sehingga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pariwisata. Partisipasi yang inklusif menjembatani dialog dan pembelajaran bersama dalam pengembangan pariwisata. Dengan demikian, adaptasi strategis pemerintah yang bersifat selektif dapat mengoptimalkan efektivitas jangka pendek, tetapi berisiko melemahkan kohesi kelembagaan masyarakat secara keseluruhan.

Komponen ketiga yang menjadi penentu kapasitas melakukan tindakan bersama adalah ketersediaan sumber daya, baik fisik maupun non-fisik. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Dinas Pariwisata telah mengalokasikan peran dan mengadakan koordinasi formal, keterbatasan jumlah anggota Pokdarwis yang aktif menghambat aktualisasi pembagian peran tersebut. Dampaknya, kegiatan kolaboratif seperti pengelolaan kebersihan, pemantauan pengunjung, dan pertemuan koordinatif tidak berjalan secara optimal. Temuan ini sesuai dengan teori (Milandika, Yudhartha and Wirantari, 2024) yang menekankan bahwa dalam praktik *collaborative governance*, kolaborasi efektif mensyaratkan ketersediaan sumber daya yang memadai termasuk sumber daya fisik, kapasitas manusia, pengetahuan bersama, serta komitmen tanggung jawab kolektif antar pemangku kepentingan karena tanpa dukungan sumber daya ini, kemampuan kolektif untuk bertindak bersama sering kali terbatas dan hasil kolaboratif menjadi kurang optimal. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa kapasitas kolektif untuk bertindak bersama belum sepenuhnya terwujud karena partisipasi masyarakat masih terbatas dan forum koordinasi jarang dilakukan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa kapasitas melakukan tindakan bersama di Pantai Vatu Mapida sangat ditentukan oleh sinergi antara kepemimpinan yang efektif, akses pengetahuan yang merata, dan ketersediaan sumber daya. Ketiadaan partisipasi yang luas, komunikasi yang tidak teratur, dan pembagian informasi yang selektif menyebabkan kolaborasi menjadi parsial, sehingga tujuan pengembangan pariwisata belum dapat dicapai secara maksimal. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dalam pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat tidak hanya bergantung pada arahan formal pemerintah, tetapi juga pada kemampuan seluruh aktor untuk beradaptasi, berbagi pengetahuan, dan memanfaatkan sumber daya secara optimal, sebagaimana diuraikan dalam teori (Emerson, Nabatchi and Balogh, 2012) mengenai *capacity for joint action*, serta penelitian (Sulistiowati, Adisa and Caturiani, 2021) terkait dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, sinergi antar-*stakeholder* menjadi aspek yang sangat penting karena keterlibatan aktif dan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, komunitas lokal, pelaku usaha, dan sektor swasta memperkuat komitmen bersama, mengatasi hambatan operasional, serta meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi secara keseluruhan.

## 2. Tindakan-Tindakan Kolaborasi di Pantai Vatu Mapida

Tindakan kolaborasi di Pantai Vatu Mapida mencerminkan dinamika kerja sama multi-aktor yang melibatkan Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata, Pokdarwis,

masyarakat, pelaku usaha, dan pengunjung. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada pembagian peran, tetapi juga mencakup upaya fasilitasi, pengembangan proses, dan sinergi operasional, yang secara kolektif bertujuan meningkatkan pengelolaan kawasan wisata. Upaya fasilitasi yang dilakukan pemerintah terlihat melalui sosialisasi kesadaran wisata serta penyelenggaraan bimbingan teknis bagi anggota Pokdarwis. Meski demikian, penelitian menemukan bahwa frekuensi kegiatan tersebut masih rendah, sehingga dampaknya terhadap partisipasi aktif anggota Pokdarwis belum optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Ansell and Gash, 2008) yang menekankan bahwa keberhasilan fasilitasi dalam konteks kolaborasi lintas pemangku kepentingan tidak hanya ditentukan oleh kegiatan sesaat, melainkan memerlukan intervensi yang kontinu dan pendampingan yang terstruktur untuk membangun kapasitas, memperkuat komitmen bersama, serta mempertahankan sinergi proses kolaboratif dalam jangka panjang, karena tanpa kerangka fasilitasi yang berkelanjutan, kolaborasi cenderung terhambat dan kurang efektif. Selain itu, partisipasi masyarakat dan Pokdarwis dalam kegiatan gotong royong serta pelatihan informal menunjukkan adanya adaptasi komunitas terhadap peluang belajar, meskipun dukungan pemerintah terbatas, sehingga modal sosial berupa komitmen kolektif dan kepercayaan menjadi faktor pengganti sementara untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi.

Upaya memajukan proses kolaborasi di Pantai Vatu Mapida menuntut komunikasi yang konsisten, forum diskusi rutin, dan koordinasi antar-aktor. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mekanisme ini belum berjalan optimal karena minimnya frekuensi pertemuan dan interaksi formal, sehingga visi pengembangan kawasan belum tersosialisasikan secara menyeluruh di tingkat akar rumput. Fenomena ini mendukung teori (Sentanu *et al.*, 2025) Literatur tentang *collaborative governance* menegaskan bahwa *capacity for joint action*, yang mencerminkan kemampuan berbagai aktor untuk bekerja sinergis dalam tindakan kolektif, sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi antar pemangku kepentingan dan struktur koordinasi yang konsisten tanpa kedua faktor ini, kapasitas kolektif untuk mengambil tindakan bersama cenderung lemah dan kurang efektif dalam mencapai tujuan kolaboratif. Minimnya komunikasi antar pihak menyebabkan disintegrasi peran antara Dinas Pariwisata dan Pokdarwis, yang mengurangi efektivitas kolaborasi dan menurunkan motivasi partisipasi masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan temuan (Fadhil *et al.*, 2025) yang menegaskan bahwa Kolaborasi publik yang efektif menuntut adanya kanal komunikasi yang kuat dan forum interaksi yang rutin antara pemangku kepentingan, karena mekanisme komunikasi yang terbuka dan pertemuan terjadwal memungkinkan aktor untuk menyelaraskan kepentingan, memperkuat pemahaman bersama, serta menciptakan koordinasi yang produktif dalam proses kolaboratif.

Di sisi lain, sinergi operasional antara Pokdarwis, pelaku usaha, dan pengunjung menunjukkan adanya bentuk kolaborasi informal yang efektif. Pokdarwis berperan dalam pengelolaan teknis, seperti kebersihan, pengaturan parkir, dan informasi pengunjung, sementara pelaku usaha menjaga kawasan untuk kepentingan ekonomi

mereka, dan pengunjung berkontribusi melalui kepatuhan terhadap norma lokal. Kolaborasi informal semacam ini menciptakan simbiosis mutualisme, di mana keberlanjutan destinasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kontribusi aktif komunitas dan sektor privat. Fenomena ini sejalan dengan (Wibowo and Belia, 2023) yang menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pariwisata berkelanjutan merupakan bagian dari prinsip pembangunan pariwisata yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Hasil penelitian menegaskan bahwa kombinasi antara strategi formal pemerintah dan praktik nyata komunitas menjadi kunci keberhasilan kolaborasi di Pantai Vatu Mapida, yang memungkinkan standar pelayanan dan kelestarian kawasan tetap terjaga meskipun terdapat kendala administratif dan struktural.

Secara keseluruhan, tindakan kolaborasi di Pantai Vatu Mapida mencakup dimensi fasilitasi, pengembangan proses, dan sinergi operasional. Meskipun sudah menunjukkan efektivitas tertentu dalam aspek sosial dan ekonomi, keterbatasan frekuensi fasilitasi, minimnya komunikasi formal, dan kurangnya forum koordinasi menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi memerlukan peningkatan kontinuitas pendampingan, komunikasi yang intens, dan sinergi yang lebih formal antara pemerintah, komunitas, dan sektor privat. Realitas ini menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif tidak hanya berbasis struktur formal, tetapi juga membutuhkan modal sosial, komunikasi transparan, dan kepedulian kolektif untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat.

### 3. Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi

Kolaborasi antara masyarakat lokal, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan pemerintah desa di Pantai Vatu Mapida telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan pariwisata, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Dampak positif terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keamanan pantai, yang tercermin dalam kegiatan gotong royong, pengawasan pengunjung, dan kepatuhan terhadap aturan desa. Fenomena ini sejalan dengan temuan (Laksmi, Arjawa and Pulawan, 2023) yang menegaskan bahwa kolaborasi antara komunitas lokal dan pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata tidak hanya memperkuat kesadaran dan keterlibatan masyarakat setempat dalam aktivitas wisata, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pengalaman wisatawan melalui kontribusi budaya autentik, layanan lokal, dan aktivitas partisipatif yang memperkaya pengalaman kunjungan.

Kolaborasi yang berjalan efektif juga mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, yang berimplikasi pada peningkatan ekonomi lokal. Pelaku usaha di sekitar pantai mendapatkan peluang pendapatan tambahan melalui penjualan makanan, minuman, dan jasa pariwisata. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Khusaini *et al.*, 2024), yang menyatakan bahwa kolaborasi *stakeholders* (*pentahelix*) dalam

pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membantu meningkatkan daya tarik desa wisata dengan melibatkan akademisi, pemerintah, pelaku bisnis, dan komunitas dalam kerangka pengembangan bersama.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara kesadaran sosial masyarakat dengan pengelolaan fisik dan estetika kawasan pantai. Walaupun masyarakat telah mengadopsi prinsip sadar wisata, keberadaan bangunan semi-permanen dan aktivitas domestik di sepanjang pantai masih mengurangi keindahan visual dan kenyamanan wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa Keberhasilan kolaborasi lintas pemangku kepentingan tidak hanya ditentukan oleh adopsi perilaku sosial di antara aktor, tetapi juga sangat bergantung pada koordinasi manajerial yang efektif dan komunikasi yang terbuka antaraktor, karena tanpa adanya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang memadai, kolaborasi cenderung tidak berjalan optimal dan tidak mencapai tujuan bersama (Hidayat, 2025). Tanpa keselarasan kebijakan antara Pokdarwis dan Pemerintah Desa, capaian positif pada aspek sosial dapat tereduksi oleh tata ruang fisik yang belum terorganisir secara optimal.

Selanjutnya, penelitian ini menyoroti aspek adaptasi dalam proses kolaborasi. Masyarakat dan Pokdarwis menunjukkan kemampuan menyesuaikan kegiatan berdasarkan umpan balik dari pengunjung maupun pemerintah desa, meskipun dukungan finansial dari pemerintah terbatas. Fenomena ini mengonfirmasi teori (Musavengane and Kloppers, 2020), yang menyatakan bahwa dalam konteks kolaborasi yang resilien, modal sosial termasuk jaringan hubungan, kepercayaan antar-aktor, dan komunikasi yang transparan berperan sebagai sumber daya strategis yang dapat memperkuat kemampuan kolektif untuk bertahan dan beradaptasi ketika sumber daya finansial terbatas, karena modal sosial memungkinkan pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan penyelesaian konflik secara efektif tanpa bergantung sepenuhnya pada dukungan moneter. Adaptasi semacam ini memungkinkan kolaborasi untuk tetap berjalan, meskipun terdapat kendala operasional, dan mendukung keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi di Pantai Vatu Mapida sudah memberikan dampak signifikan terhadap kesadaran masyarakat dan peluang ekonomi, tetapi masih memerlukan peningkatan komunikasi, koordinasi pengelolaan fisik, dan strategi adaptasi yang lebih sistematis agar tujuan pengembangan pariwisata dapat tercapai secara menyeluruh. Integrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan manajerial menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan kolaborasi serta pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini memberikan pencerahan mengenai praktik kolaborasi antara Pemerintah Desa Enu dan Kelompok Sadar Wisata dalam pengembangan Pantai Vatu Mapida, dengan memberikan wawasan berharga tentang dinamika kolaborasi, tindakan bersama, serta dampak dan adaptasi dalam pengelolaan wisata berbasis

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi terbentuk melalui pembagian peran yang jelas, motivasi dan kepercayaan bersama antaraktor, serta kapasitas untuk melakukan tindakan kolektif, meskipun partisipasi anggota Kelompok Sadar Wisata yang terbatas dan kendala komunikasi menjadi tantangan utama. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan wisata berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan aktor, tetapi juga oleh kemampuan mereka beradaptasi dan berkoordinasi dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan kondisi pasca bencana. Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain fokus pada satu destinasi wisata sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan, data yang diperoleh lebih banyak dari anggota aktif Pokdarwis, serta observasi jangka panjang yang masih terbatas. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata meningkatkan partisipasi anggota melalui pelatihan dan sosialisasi rutin, memperkuat mekanisme komunikasi dan koordinasi, serta melakukan evaluasi berkala terhadap strategi pengelolaan wisata. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan studi ke beberapa destinasi wisata berbasis masyarakat, menilai dampak jangka panjang kolaborasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan, serta mengembangkan model tata kelola kolaboratif yang lebih adaptif dan inklusif, sehingga memberikan dasar kebijakan yang lebih komprehensif untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan.

### Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sasterio, M.Si selaku dosen pembimbing utama, serta Ibu Sulfitri Husain, M.Si selaku dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan karya ilmiah ini. Bimbingan dan dukungan beliau menjadi sumber motivasi dan panduan penting bagi penulis hingga penelitian ini selesai. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesainya penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

### Referensi

- Afni, I.N. (2022) "Stakeholder Mapping dalam Pelaksanaan Community Tourism Collaborative Governance (CTCG) di Desa Maron Wonosobo," *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), pp. 123–136. Available at: <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.853>.
- Ahmad, A.J. *et al.* (2024) "Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata Melalui Partisipasi Masyarakat," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), pp. 252–261. Available at: <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3113>.

- Ansell, C. and Gash, A. (2008) "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), pp. 543–571. Available at: <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Aprilia, N., Asrifai and Ahdiah, I. (2025) "PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN: STUDI KASUS LIBU PEREMPUAN PALU," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 248–358.
- Berliandaldo, M., Chodiq, A. and Fryantoni, D. (2021) "Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong," *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 4(2), pp. 221–234. Available at: <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.179>.
- Chan, J.K.L., Marzuki, K.M. and Mohtar, T.M. (2021) "Local Community Participation and Responsible Tourism Practices in Ecotourism Destination: A Case of Lower Kinabatangan, Sabah," *Sustainability*, 13(23), p. 13302. Available at: <https://doi.org/10.3390/su132313302>.
- Damanik, M.O. and Rahayu, A.Y.S. (2021) "Kolaborasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Ditinjau Dari Model Tata Kelola Kolaboratif," *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), pp. 44–54. Available at: <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.5922>.
- Emerson, K., Nabatchi, T. and Balogh, S. (2012) "An Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), pp. 1–29. Available at: <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.
- Fadhil, M. *et al.* (2025) "Between State and Society: Government Communication Strategies and Stakeholder Collaboration for Tourism Development in the Pantai Batee Puteh Area, West Aceh," *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora*, 3(1), pp. 49–66. Available at: <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol3iss1pp49-66>.
- Graesser, A.C. *et al.* (2020) "Collaboration in the 21st century: The theory, assessment, and teaching of collaborative problem solving," *Computers in Human Behavior*, 104, p. 106134. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.09.010>.
- Hanafi, M. (2022) "PENGEMBANGAN PARIWISATA MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KABUPATEN MAGELANG," *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 19(1), pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v19i1.53447>.
- Hidayat, W. (2025) "Penguatan Collaborative Governance Berbasis Partisipatif dalam Mengatasi Hambatan Digitalisasi UMKM di Bangka Belitung," *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 13(2), pp. 141–155. Available at: <https://doi.org/10.31289/publika.v13i2.16261>.
- Khusaini, Moh. *et al.* (2024) "Stakeholders Collaboration in Optimizing Tourism and Creative Economy Integration," *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 7(2), pp. 179–190. Available at: <https://doi.org/10.17509/jithor.v7i2.75234>.
- Laksmi, P.A.S., Arjawa, I.G.W. and Pulawan, I.M. (2023) "Community Participation to Improve Tourism Industry Performance: A Case Study in Mandalika Lombok

- Tourist Area," *International Journal of Social Health*, 2(6), pp. 377–384. Available at: <https://doi.org/10.58860/ijsh.v2i6.63>.
- Lestari, W., Yulyana, E. and Aryani, L. (2022) "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Alam Green Canyon di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(7). Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6557133>.
- Masaguni, O.S. et al. (2025) "ANALISIS MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAERAH," *Jurnal Administrasi, Manajemen SDM dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 4(2). Available at: <https://doi.org/10.37606/jaeis.v4i2.352>.
- Mashita, P., Mahfuzat and Abdi, Fahmi S. (2024) "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PARALAYANG WAYU DI KECAMATAN MARAWOLA BARAT KABUPATEN SIGI," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 31–40.
- Maspuha, I.H., Ardiansyah, R. and Darmawan, R. (2025) "Peran Stakeholders Dengan Pendekatan Pentahelix Pada Pengembangan Desa Wisata Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu," *JURNAL MATA PARIWISATA*, 4(2), pp. 41–47. Available at: <https://doi.org/10.59193/jmp.v4i2.380>.
- Milandika, K.B.R.I., Yudarta, I.P.D. and Wirantari, I.D.A.P. (2024) "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Berkelanjutan Desa Wisata Kamasan," *Socio-political Communication and Policy Review*, 1(5), pp. 23–36. Available at: <https://doi.org/10.61292/shkr.165>.
- Musavengane, R. and Kloppers, R. (2020) "Social capital: An investment towards community resilience in the collaborative natural resources management of community-based tourism schemes," *Tourism Management Perspectives*, 34, p. 100654. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100654>.
- Nurhayati, N., Kusuma, H. and Rahman, A. (2024) "Strategi Tata Kelola Kolaboratif Dalam Meningkatkan Motivasi Pelayanan Publik: Peran Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Kualitas Relasional," *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 12(2), pp. 154–174. Available at: <https://doi.org/10.34010/agregasi.v12i2.14017>.
- Pratama, A.R., Alamsyah, M.N. and Bahri, S. (2024) "KEMITRAAN STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PETANI DI DESA BOBO," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 15–30.
- Pratiwi, Y. (2025) "Sinergi untuk Pesisir: Analisis Tata Kelola Kolaboratif dan CBT di Lima Desa Wisata Belitung," *Sadar Wisata: Jurnal Pawirisata*, 8(1), pp. 215–226. Available at: <https://doi.org/10.32528/sw.v8i2.4602>.
- Putro, H.P.H. and Briliayanti, A. (2019) "THE EFFECTIVITY OF STAKEHOLDERS' COLLABORATION ON TOURISM DESTINATION GOVERNANCE IN PANGANDARAN, WEST JAVA, INDONESIA," *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 17(1), p. 25. Available at: <https://doi.org/10.5614/ajht.2019.17.1.3>.
- Ragentu, A., Darwis and Pradana, A. (2025) "Pengelolaan Objek Wisata Alam Air

- Terjun Saluopa Di Kabupaten Poso," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 321–334.
- Rahman, A.F. and Natalia, D.C. (2025) "Community independence as empowerment in tourism village development: a study from Batu City, East Java," *Jurnal Pariwisata Pesona*, 10(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.26905/jpp.v10i1.15381>.
- Rasyid, K. and Darumurti, A. (2022) "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Obyek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(2), pp. 75–91. Available at: <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i2.13476>.
- Riyanto, F. and Nugraha, A. (2023) "Development of Community-Based Tourism Village through Local Community Participation (A Literature Review)," *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 1(3), pp. 223–233.
- Robertson, P.J. and Choi, T. (2012) "Deliberation, Consensus, and Stakeholder Satisfaction: A simulation of collaborative governance," *Public Management Review*, 14(1), pp. 83–103. Available at: <https://doi.org/10.1080/14719037.2011.589619>.
- Sentanu, I.G.E.P.S. *et al.* (2025) "Collaboration as a Capacity for Joint Action in CommunityBased Cultural Heritage Tourism Management," *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), pp. 120–140. Available at: <https://doi.org/10.26618/xpnbcf02>.
- Sulistiowati, R., Adisa, A.F. and Caturiani, S.I. (2021) "Stakeholder Synergy For Sustainable Tourism," *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship*, 3(1), pp. 53–60. Available at: <https://doi.org/10.35912/joste.v3i1.1236>.
- Syarifuddin, D. (2025) "Modal Sosial dan Dinamika Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata Berkelanjutan," *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), pp. 37–52. Available at: <https://doi.org/10.53682/jpsre.v6i1.11660>.
- Utami, A.T., Adianto, A. and Mayarni, M. (2022) "Collaborative Governance Process in Supporting Smart Living in Pekanbaru City," *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(2), pp. 215–233. Available at: <https://doi.org/10.15575/jpan.v14i2.21371>.
- Wibowo, M.S. and Belia, L.A. (2023) "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan," *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, 6(1), pp. 25–32. Available at: <https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.58108>.
- Wiranata, F.R., Hartawan and Yunus (2025) "Kolaborasi Pemerintah dalam Penyediaan Hunian Tetap Pasca Bencana di Talise Valangguni," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(3), pp. 41–54.
- Yanes, A. *et al.* (2019) "Community-Based Tourism in Developing Countries: A Framework for Policy Evaluation," *Sustainability*, 11(9), p. 2506. Available at: <https://doi.org/10.3390/su11092506>.

- Yasinta, P.N. (2020) "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN GIANYAR," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>.
- Zabukovec Baruca, P. and Čivre, Ž. (2022) "Unique Destination Attributes as a Basis of Tourism Experience," *Academica Turistica*, 15(3), pp. 349–362. Available at: <https://doi.org/10.26493/2335-4194.15.349-362>.